

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pajak merupakan pungutan yang bersifat politis dan strategis sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bersifat politis karena pungutan pajak adalah perintah konstitusi, dan bersifat strategis karena pajak merupakan tumpuan utama bagi negara dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan. Salah satu yang mempunyai potensi besar untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah Objek Pajak Sektor Perkotaan, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Objek Pajak Bumi dan Bangunan meliputi bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, seperti tanah, perairan pedalaman dan laut Wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, seperti : hotel/pabrik, Jalan tol, kolam renang, tempat penampungan (kilang minyak, air dan gas, pipa minyak), dermaga, tempat olahraga, pagar mewah (taman mewah) dan fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Pelaksanaan operasional terhadap Objek Pajak Sektor Perkotaan, yaitu PBB membutuhkan adanya suatu Sistem Manajemen Informasi. Hal ini dilakukan adalah untuk mempermudah dalam penatausahaannya. Dalam Sistem Manajemen Informasi ini dibahas mengenai tata cara pembayaran, pemindahan buku dan pelimpahan hasil penerimaan PBB dari Objek Pajak.

Perkembangan sistem informasi yang kian pesat memaksa Direktorat Jenderal Pajak harus mengikuti perkembangan tersebut. Dimana Direktorat Jenderal Pajak melakukan kerja sama dengan Bank Central Asia (BCA) dalam transaksi pembayaran PBB on line nasional melalui fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA, atas Rekening Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dilakukan untuk mempermudah bagi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran hutang PBB, dan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PBB.

Dipilihnya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Binjai sebagai objek penelitian dinilai cukup memadai, dimana kantor ini khusus menangani masalah Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis memilih judul :
SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK SEKTOR PERKOTAAN
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BINJAI.

B. Perumusan Masalah

Setelah penulis mengadakan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Binjai, diperoleh masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

Apakah sistem manajemen informasi objek pajak sektor perkotaan telah diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Binjai ?

C. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam penulisan ini, maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah yang timbul dalam Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Sektor Perkotaan, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Binjai.